

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERKAITAN DENGAN HARGA BERBENTUK KODE UNIK MELALUI METODE TRANSFER BANK PADA TRANSAKSI *ONLINE***

**I PUTU WAHYU PRADIPTHA WIRJANA**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai pengaturan harga dalam bentuk kode unik melalui metode transfer bank pada transaksi *online* di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan harga berbentuk kode unik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Sedangkan asas hukum yang mendasarinya adalah asas perlindungan konsumen dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, yang menekankan pada data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisa dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa pengaturan harga berbentuk kode unik pada transaksi *online* di Indonesia belum diatur secara jelas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Banyak pelaku usaha *e-commerce* yang mencantumkan kode unik tersebut apabila pembeli/konsumen melakukan pembayaran dengan memilih metode transfer antar bank. Hal ini untuk memudahkan pelaku usaha *e-commerce* untuk melakukan verifikasi pembayaran. Pelaku usaha membuat *term of service* pada halaman *website* atau toko *online* yang mengatur mengenai kode unik tersebut. *Term of service* kadang kala tidak diperhatikan oleh pembeli/konsumen karena letak dari *term of service* berada di bawah ataupun di tempat lain dalam *website* tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen mengacu pada harga berbentuk kode unik masih lemah. Saat ini perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diberikan yaitu secara preventif disyaratkan dengan adanya suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan secara represif dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan pengajuan gugatan perdata dan sanksi pidana. Sedangkan jalur non litigasi dengan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

**LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMER RELATING TO THE  
PRICE UNDER CODE UNIQUE THROUGH TRANSFER BANK  
METHOD ON ONLINE TRANSACTIONS**

**I PUTU WAHYU PRADIPTHA WIRJANA**

**ABSTRACT**

*This research was conducted to know about the price arrangement in the form of unique code through bank transfer method in online transaction in Indonesia and the form of legal protection to consumer related to the price of the form of unique code. The theory used in this research is legal certainty theory proposed by Gustav Radbruch. And the basic legal principle in this research is the principle of consumer protection and the establishment of legislation.*

*The research method is normative legal with juridical approach, which emphasizes on secondary data consisting of primary and secondary law material. Data were analyzed by qualitative analysis method.*

*The results of this research formulated that the price-shaped arrangement unique in the online transaction in Indonesia has not been clearly regulated in Law Number 19 Year 2016 About Amendment to Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions. Many e-commerce business actors include the unique code if the buyer/consumer makes a payment by choosing the interbank transfer method. This is to facilitate e-commerce business to verify payment. Business actors create terms of service on the web page or online store that regulates the unique code. Sometimes, term of service is not considered by the buyer/consumer because the location of the terms of service is under or elsewhere in the website. The form of legal protection against consumers refers to the price of unique code shaped is still weak. Currently, the legal protection of the consumer can be given prevention with the existence of a Certification Institute of Reliability, based on Article 10 Paragraph (2) of Law Number 19 Year 2016 About Amendment to Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transaction and repressive by way of dispute settlement through litigation and non litigation. The litigation lane is done by filing a civil suit and criminal sanction. And non litigation path is used Alternative Dispute Settlement.*

*Keywords: Legal Protection Against Consumers*